

KEKERASAN SOSIAL DI KALIMANTAN: SEBUAH ANALISIS AWAL¹

Amri Marzali

I. Pengantar

Konflik dengan cara kekerasan seperti menyerang, mencederai, membakar, bahkan membunuh yang terjadi antara Orang Dayak melawan migran Madura dan melawan perusahaan industri besar seperti HPH, HPHTI, Perkebunan, dan Pertambangan, adalah gejala sosiokultural yang makin sering terjadi di Kalimantan sejak dasawarsa 1990-an.² Gejala ini semakin berkembang semenjak kejatuhan Soeharto Mei 1998. Ada kesan bahwa Orang Dayak yang selama ini adem-ayem saja direndahkan, dilecehkan, dan dimarginalkan oleh pihak-pihak lain yang berasal dari luar Kalimantan, kini bangkit unjuk gigi. Ada kesan bahwa toleransi Orang Dayak terhadap keagresifan pihak-pihak dari luar, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang merugikan Orang Dayak, sudah sampai pada batasnya.

Secara teoritis, dalam “kekerasan sosial” ini para aktornya – khususnya Orang Dayak - telah memperlihatkan semacam gejala *unstructured behavior*. Dalam situasi *unstructured behavior*, pada kutub ekstrimnya, terjadi hal-hal sebagai berikut: eksistensi nilai-nilai kultural dan norma-norma sosial kelompok dinafikan, struktur sosial terganggu, dan individu anggota kelompok kehilangan jati dirinya. Kekerasan sosial dapat terwujud dalam bentuk *crowd*, *mob*, *riot*, dan *social movement*. Kekerasan sosial yang terjadi di Kalimantan, khususnya yang melibatkan Orang Dayak, diduga baru terwujud dalam bentuk *mob* dan *riot*.

II. Ruang Lingkup Studi, Masalah Penelitian, dan Susunan Isi Karangan.

Kekerasan sosial dalam bentuk *mob* dan *riot* adalah bagian dari *collective behavior* dalam ilmu sosiologi. Tingkatan yang kurang “keras” dari *collective behavior* adalah *crowd*. Sedangkan tingkatan yang berdampak politik luas disebut *social movement*. Penggunaan istilah kekerasan sosial dalam tulisan ini adalah dalam rangka untuk memberi kesan lebih dramatis terhadap istilah *collective behavior* yang begitu netral dan objektif. Hal ini sesuai

¹ Makalah ini dibacakan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II “Globalisasi dan Kebudayaan Lokal”, yang diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesia dan Universitas Andalas, 18-21 Juli 2001, di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang. Prof. Dr. Amri Marzali kini adalah Ketua Program Pascasarjana Antropologi, FISIP Universitas Indonesia.

² Amri Marzali, “Tekanan Penduduk, Kompetisi atas Sumberdaya, dan Kerusakan Masaal”, dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2, 1997. Jakarta: LIPI.

dengan fakta yang ditemukan di Kalimantan, di mana wujud yang umum dari kekerasan sosial adalah *mob* dan *riot*.

Makalah ini memusatkan perhatian pada Orang Dayak di Kalimantan. Makalah akan membahas gejala kekerasan sosial yang terjadi antara Orang Dayak melawan migran Madura dan melawan perusahaan-perusahaan HPH dan HTI. Sepanjang berkaitan dengan Orang Dayak, kami percaya bahwa kedua jenis kekerasan sosial ini tidak berdiri sendiri, tapi saling terkait, didorong oleh beberapa faktor dominan yang sama. Pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kekerasan sosial yang selama ini dipertunjukkan Orang Dayak di Kalimantan dapat dikatakan baru sampai pada tingkat *mob* dan *riot*, belum berkembang dan tidak mungkin berkembang menjadi sebuah *social movement* ? Apakah kekerasan sosial tersebut tidak terdorong oleh faktor ideologi politik dan keagamaan, dan dengan tujuan untuk membentuk satu kesatuan politik dan keagamaan tersendiri yang terpisah dari masyarakat negara Indonesia ?
2. Apakah kekerasan sosial yang selama ini melibatkan Orang Dayak di Kalimantan dapat dikatakan sebagai gejala dari tuntutan *status repositioning* dari kelompok etnik Dayak dalam konteks sosial-ekonomi-politik Kalimantan, dan dalam konteks Indonesia seanteronya, yang selama ini telah dilecehkan (dimarginalkan) oleh berbagai pihak dari luar? Apakah gerakan tersebut dapat dikatakan sebagai satu bentuk tuntutan kepada pihak-pihak lain di Kalimantan dan Indonesia umumnya untuk menghargai posisi sosial Orang Dayak secara wajar.

Semua jenis kekerasasan sosial, atau *collective behavior*, menurut Smelser, dapat terjadi jika dipenuhi 6 kondisi berikut ini.³ Kondisi-kondisi tersebut adalah:

1. Struktur sosial yang kondusif (*structural conduciveness*),
2. Adanya ketegangan struktural (*structural strain*),
3. Adanya keyakinan bersama di kalangan pelaku kekerasan sosial tentang sebab dari ketegangan (*appropriate generalized belief*),
4. Adanya faktor pemicu (*precipitating factors*),
5. Adanya massa yang dimobilisasi oleh pemimpin (*mobilization for action*), dan
6. Tidak ada atau lemahnya kontrol sosial (*lack of social control*).

³ Neil J. Smelser, *The Theory of Collective Behavior*, New York: Free Press, 1962.

Bagaimana situasi di Kalimantan? Di bawah ini akan digambarkan terlebih dahulu bagaimana keadaannya kondisi-kondisi di atas pada dua arena hubungan sosial di Kalimantan, yaitu di arena industri kayu HPH dan HTI dan di arena pergaulan dengan migran Madura. Setelah itu barulah dilakukan analisis untuk menjawab dua pertanyaan pokok yang diajukan dalam makalah ini.

III. Kondisi Munculnya Kekerasan Sosial terhadap Industri Kayu di Kalimantan.

Pertama mari kita tinjau bentuk struktur sosial masyarakat Kalimantan yang dianggap kondusif tersebut (*structural condusiveness*), khususnya yang berhubungan dengan situasi sosial di industri kayu HPH dan HTI. Seandainya kita semua Orang Indonesia masih berada dalam masyarakat berladang berpindah seperti kebanyakan Orang Dayak, atau bersawah subsistensi sebagaimana pada umumnya Orang Jawa tradisional, maka kekerasan sosial antara Orang Dayak dengan perusahaan HPH dan HTI dan dengan migran Madura seperti yang digambarkan di atas kecil sekali kemungkinannya untuk muncul.

Di Indonesia, termasuk di Kalimantan, kekerasan sosial di kalangan petani pedesaan baru mulai marak sejak zaman kolonial Belanda. Untuk Indonesia, contoh-contoh tentang *peasant movement* ini dapat dilihat dalam buku Kartodirdjo.⁴ Artinya, sistem politikal kolonial yang otoriter dan opresif telah menciptakan suasana kondusif untuk munculnya kekerasan sosial di pedesaan Indonesia, karena sistem politikal tersebut menciptakan satu stratifikasi sosial yang tidak wajar, penghisapan manusia oleh manusia, kekerasan dan pemaksaan tanpa keadilan, dst.

Pada zaman Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia makin maju, memasuki struktur masyarakat industri kapitalis modern. Di pedalaman Kalimantan, di mana mayoritas penduduk asli Dayak hidup secara tradisional sebagai peladang berpindah, mulai dibuka perusahaan-perusahaan industri besar modern, seperti perusahaan HPH dan Perkebunan besar, yang kemudian disusul dengan perusahaan HTI dan Pertambangan.

Dengan demikian struktur sosial makin kompleks dan pertentangan kepentingan antara pihak kapitalis dan petani tradisional makin tajam, dan konsekwesinya kekerasan sosial makin mudah untuk pecah. Dalam struktur masyarakat industri kapitalis ini, masyarakat Dayak yang menjadi penduduk asli pedalaman Kalimantan telah jatuh menjadi kelompok

⁴ Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java*. Singapore: Oxford University Press, 1973. Contoh di luar Indonesia silahkan lihat antara lain: James C. Scott, *The Moral Economy of the Peasant*. New haven: Yale University Press, 1978; Eric R. Wolf, *Peasant Wars of the Twentieth Century*. London: Faber & Faber, 1973; Paul Friedrich, *Agrarian Revolt in a Mexican Village*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.

minoritas, inferior, subordinat, dan marginal. Situasi ini tentu saja tidak dapat diterima oleh Orang Dayak yang merasa sebagai pemilik syah secara turun temurun atas tanah dan hutan pedalaman Kalimantan.

Di bawah ini diperlihatkan ciri-ciri yang bertentangan antara industri HPH dan usaha ekonomi keluarga Dayak.⁵

Tabel 1. PERBANDINGAN PERUSAHAAN HPH DAN UNIT EKONOMI KELUARGA DAYAK

PERUSAHAAN HPH/HTI	USAHA PERTANIAN TRADISIONAL MASYARAAAT DAYAK
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit ekonomi kapitalis 2. Perusahaan modern 3. Penggunaan teknologi canggih 4. Prinsip maximisasi keuntungan 5. Milik dan dikelola oleh kapitalis luar 6. SDM modern dan terdidik 7. Modal besar yang tidak terdayakan oleh pribumi 8. Dibeking oleh pemerintah 9. Pengganggu ketenangan kehidupan tradisional masyarakat lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit ekonomi subsistens 2. Usaha keluarga tradisional 3. Teknologi sangat sederhana bagi perladangan berpindah 4. Prinsip secukup hidup harian 5. Milik dan dikelola oleh penduduk asli Dayak 6. SDM masyarakat terasing dan tak terdidik 7. Orang miskin dengan modal yang sangat kecil 8. Lemah tidak terlindung oleh siapapun 9. Kegiatan pertanian mereka dianggap mengganggu kegiatan HPH.

Syarat kedua bagi pecahnya kekerasan sosial adalah jika ada ketegangan struktural (*structural strain*). *Mob* Orang Dayak yang menyerbu base-camp HPH dan Pertambangan, misalnya, muncul karena adanya masalah sosial, semisal konflik kepentingan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan, atau kesenjangan antara apa yang diharap dengan apa yang didapat.

Di pedalaman Kalimantan, sejak kawasan hutan alam dipetak-petak ke dalam areal HPH oleh Pemerintah Orde Baru, Orang Dayak makin susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berladang berpindah dilarang oleh Pemerintah karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan HPH. Hutan tempat hidup berbagai bintang liar sumber protein mereka sudah kalang kabut dikacau kegiatan pembalakan kayu HPH. Anak gadis dan perempuan mereka rentan akan gangguan sosial pekerja HPH yang kebanyakan adalah lelaki lajang. Adat istiadat “orang dahulu”, atau agama helu kaharingan, dan tempat-tempat suci banyak tercemar oleh kecerobohan para pekerja perkayuan dan pendatang baru. Yang terlebih parah lagi adalah dampak dari kegiatan HTI, yang secara teknis harus membersihkan

habis seluruh areal hutan penguasaan mereka, untuk ditanami tanaman pohon baru. Di areal HTI ini tidak ada, atau tidak diakui lagi, apa yang disebut sebagai hutan ulayat atau tempat-tempat suci. Banyak lagi hal lain yang tidak perlu disebutkan tentang bagaimana situasi *structural strain* yang diderita oleh Orang Dayak pedalaman sejak awal zaman pemerintahan Soeharto.

Syarat ketiga adalah jika ada sebuah keyakinan umum (*appropriate generalized belief*). Keyakinan umum adalah semacam ideologi, atau satu sistem makna, yang akan mendorong munculnya semacam respon tertentu. Sebelum sampai kepada satu keyakinan, orang harus dapat menentukan masalah yang mereka hadapi, kemudian mendiagnosis masalah tersebut, dan terakhir menentukan faktor-faktor penyebabnya.

Di pedalaman Kalimantan, Orang Dayak secara bersama percaya bahwa HPH, HTI, Perkebunan, dan Pertambangan besar adalah sumber dari kemelaratan mereka, sumber dari kekacauan kehidupan sosial mereka, sumber dari kehancuran adat dan agama helu kaharingan mereka, dst. Kehidupan sosial-ekonomi-kultural tradisional yang mereka warisi selama beratus-ratus bahkan ribuan tahun dari nenek moyang mereka, kini goncang karena diabrak-abrik oleh pendatang baru tersebut. Ketenteraman hidup dan harga diri kelompok Dayak sudah compang camping.

Namun demikian, kata Smelser, harus diingat bahwa ketiga kondisi di atas belum cukup kuat untuk mendorong orang untuk melakukan kekerasan sosial. Masih diperlukan kondisi-kondisi lain di bawah ini untuk mendukungnya.

Kondisi keempat untuk munculnya kekerasan sosial adalah jika muncul faktor-faktor pemicu (*precipitating factors*). Di Kalimantan, agak sukar menentukan mana satu diantara berbagai faktor yang dapat dianggap sebagai pemicu kekerasan sosial antara Orang Dayak dengan perusahaan industri besar modern. Faktor pemicu ini mungkin mempunyai ciri-ciri khusus, misalnya pelanggaran atas batas hutan ulayat yang dilakukan pihak perusahaan, atau kegiatan perusahaan yang menyebabkan pencemaran atas sumber air penduduk. Dalam hal ini, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam atas berbagai kekerasan sosial Orang Dayak terhadap perusahaan industri besar untuk menentukan faktor pemicunya.

Kondisi kelima adalah jika peserta kekerasan sosial dapat dimobilisasi untuk ikut dalam tindakan *mob* atau *riot*. Kondisi ini disebut *mobilization for action*. Begitu faktor pemicu muncul, maka kerumunan akan segera tercipta, di lingkungan tetangga, pasar, atau tempat pertemuan umum lain. Dan orang-orang tertentu akan segera muncul untuk mengajak,

⁵ Mengingat tempat yang terbatas, tabel ini tidak dibahas secara rinci. Diharapkan pembaca dapat

memimpin dan mendorong massa untuk ikut dalam aksi. Dalam kondisi inilah para pemimpin (atau sering kita juluki sebagai provokator) muncul, berteriak, membujuk, mengarahkan dan memanas-manasi orang-orang. Kalau para pemimpin ini berhasil maka kekerasan sosial atau aksi agresivitas pun pecah. Namun demikian, fakta-fakta lain menunjukkan bahwa faktor pemicu ini justru diciptakan, atau dibesar-besarkan, oleh para pemimpin kekerasan sosial.

Di sini sekali lagi, kami harus mengakui kekurangan data untuk menentukan ciri-ciri pemimpin gerakan kerusuhan sosial Dayak, hubungan antara para pemimpin dan massa yang digerakkannya, dan proses bagaimana mereka menggerakkan massa untuk melakukan kekerasan terhadap perusahaan. Semua ini adalah kegiatan yang tersembunyi. Untuk menemukannya diperlukan satu penelitian antropologi yang agak cermat dan lama. Dalam berbagai kasus kerusuhan sosial terhadap perusahaan besar, mereka yang dituduh sebagai penggerak "mob" dan "riot" adalah tokoh-tokoh LSM yang berasal dari luar dan tokoh-tokoh adat Dayak yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Tokoh-tokoh Dayak tersebut mempunyai banyak hubungan dengan dunia luar, dan tahu cara mengeksploitasi isu-isu sosial bagi kepentingan kelompok maupun pribadinya.

Kondisi keenam, atau terakhir, adalah jika *social control* gagal untuk menghentikan kejadian tersebut. Semua orang tentu setuju bahwa polisi, kejaksaan, pengadilan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, massmedia, dan para pemimpin masyarakat, formal atau non-formal, berkewajiban untuk mencegah agar aksi-aksi kekerasan yang sedang berlangsung tidak berkembang merebak dan mengganas. Jika kontrol sosial, tindakan preventif, atau tindakan *law enforcement* tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang berwenang maka aksi kekerasan sosial akan bergerak dengan lancar, berkembang ke arah yang tidak terkendali, bahkan bisa berkembang menjadi brutal dan fatal.

Dalam berbagai kasus *mob* penduduk setempat melawan perusahaan industri besar, kontrol sosial biasanya tidak berjalan. Polisi tidak mempunyai daya untuk mengontrol aksi *mob* ini, baik karena tidak punya personil, tidak punya sistem, tidak punya biaya, sampai kepada kekurangan moral. Begitu juga halnya Pemerintah Daerah. Konflik antara penduduk setempat melawan perusahaan industri tertentu biasanya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terkait langsung, apakah melalui jalan negosiasi damai atau jalan pengadilan. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara damai maka yang merasa diri kuat akan menyerang pihak yang lemah secara fisik. Dalam banyak kasus, pihak yang kuat secara fisik adalah

penduduk lokal. Maka terjadilah penyerangan terhadap *base camp* HPH, penutupan jalan transportasi menuju ke pabrik dan pertambangan, dsb.

Keenam kondisi ini dapat dijadikan *checklist* oleh para ahli ilmu sosial untuk mempelajari kejadian-kejadian kerusuhan sosial dari *mob*, *riot*, sampai *social movement*. Kondisi-kondisi mana yang positif membuat kejadian tersebut pecah.

IV. Kondisi Munculnya Kekerasan Sosial terhadap Migran Madura di Kalimantan.

Sekarang mari kita gunakan *checklist* Smelser di atas untuk melihat fenomena kekerasan sosial antara Orang Dayak melawan migran Madura. Pertama adalah faktor *structural condusiveness*. Seperti kita ketahui dari sejarah, sejak lama penduduk asli Kalimantan adalah Orang Dayak, yang tinggal di pedalaman dengan kegiatan pokok berladang berpindah, dan Orang Melayu (termasuk Orang Banjar, Kutai, dan Pasir) yang tinggal di pesisir dengan kegiatan bertani di sawah, menangkap ikan di laut, dan berniaga.

Kemudian, sebagai konsekwensi dari kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah tahun 1950an, Kalimantan mulai memasuki struktur sosial yang baru. Sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia, Kalimantan mulai kedatangan migran dari berbagai daerah lain, khususnya Orang Jawa, Bugis, dan Madura. Para migran ini tidak hanya tinggal di kota, tapi juga merasuk sampai ke desa-desa di pedalaman. Akibatnya struktur sosial berdasarkan etnik dan agama menjadi berubah di Kalimantan. Kota-kota besar dan kecil di Kalimantan berkembang menjadi kota-kota multi etnik. Di kota-kota besar Kalimantan, seperti Pontianak dan Balikpapan budaya lokal tidak menjadi budaya yang dominan. Sementara itu sebagian besar Orang Dayak masih hidup terisolasi di pedalaman dengan cara berladang berpindah. Mereka kurang memperoleh fasilitas pendidikan dan banyak kemudahan lain dari pemerintah.

Dengan terbukanya Kalimantan untuk perusahaan-perusahaan industri besar sejak akhir tahun 1960an dan awal 1970an, makin banyak masuk pekerja dari luar. Para pekerja ini terdiri dari berbagai suku-bangsa di Indonesia, bahkan pada zaman bom kayu, banyak yang datang dari luar negeri, seperti dari Filipina, Korea, dan Malaysia. Kejadian ini membuat struktur sosial makin kompleks di Kalimantan. Malahan di kota dan desa tertentu migran Madura telah menjadi kelompok mayoritas dalam jumlah penduduk dan dominan secara sosial-ekonomi-politik mengatasi kelompok-kelompok etnik lain.

Masuknya penduduk luar, khususnya migran Madura, ke Kalimantan membuat penduduk Dayak terdesak secara ekonomi. Dalam hubungan sosial Orang Dayak terutama

menghadapi kesulitan dengan kelompok migran Madura. Mereka merasa direndahkan oleh migran Madura. Dalam banyak kejadian Orang Dayak merasa dizalimi, dilecehkan, dan dicurangi oleh migran Madura. Ketika mereka melawan, mereka segera dicerai oleh migran Madura tersebut, bahkan sampai dibunuh. Di kalangan penduduk Kalimantan, migran Madura memang terkenal sebagai orang yang ulet, pekerja keras, bertempamental tinggi, suka membawa senjata tajam, dan tidak segan-segan untuk mencederai bahkan membunuh musuhnya ketika bertengkar.

Hal ini membuat Orang Dayak masuk kedalam kondisi *structural strain*. Mereka mengkuatirkan masa depan kedudukan sosial, politik, dan ekonomi mereka di Kalimantan. Disamping terdesak dalam bidang ekonomi, Orang Dayak, khususnya yang non-muslim, juga terdesak dalam bidang politik. Banyak kedudukan-kedudukan penting dalam pemerintahan daerah, termasuk Bupati, dipegang oleh orang luar yang beragama Islam. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku secara tidak resmi. Menurut Orang Dayak, mestinya daerah itu dipimpin oleh “putera daerah”, dan di Kalimantan Tengah, “putera daerah” itu adalah Orang Dayak.

Di Kalimantan, diantara semua kelompok migran, nampaknya migran Madura adalah kelompok yang paling tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bila migran lain yang beragama Islam, seperti Orang Jawa, Bugis, Minangkabau, Banjar dengan cepat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, dan terus menjadi “Melayu”, maka migran Madura yang juga Islam tidak pernah bisa menjadi “Melayu”. Mereka tetap mempertahankan eksklusivitasnya, baik dalam bidang pekerjaan, kekerabatan, pola menetap, sampai ke kegiatan keagamaan.

Satu lagi faktor yang khas pada migran Madura adalah kelompok premanya, yang banyak masuk ke Kalimantan semenjak sekitar tahun 1980an. Kelompok kecil migran Madura yang keras ini terkenal dengan tindakan kriminalnya, seperti mencuri, mengugut, memalak, mendesak, mengambil hak milik orang lain khususnya tanah secara tidak terpuji. Mereka menciptakan keresahan terhadap lingkungan sosialnya. Mereka bukan saja meresahkan Orang Dayak, tapi juga kelompok etnik lain.

Malangnya, fenomena premanisme ini tidak bisa dilepaskan dari fenomena yang lain, yaitu solidaritas etnik Madura dan korupsi Polisi. Apabila seorang preman Madura tertangkap, kemudian diserahkan kepada Polisi, maka biasanya dalam beberapa hari preman ini sudah keluar, tanpa diadili. Kata orang, kerabat dari preman ini telah menyogok polisi untuk mengeluarkan preman tersebut dari tahanan Polisi, dan perkaranya tidak diteruskan ke

kejaksaan dan pengadilan. Kalau preman ini tertangkap tangan, lalu diadili oleh pihak lain, maka para pengadil ini akan dibalas langsung oleh para migran Madura secara bersama. Bahkan pembalasan ini bisa lebih keras dari hukuman yang diterima sang preman dari pengadilnya.

Preman adalah satu subkultur dalam budaya Madura. Subkultur lain adalah pekerja kasar kelas bawah, pegawai, pengusaha, dan kyai-santri. Nampaknya solidaritas etnik Madura tidak mengenal subkultur. Solidaritas etnik Madura tidak dapat membedakan Madura yang preman dari Madura yang kyai-santri. Solidaritas etnik melingkup seluruh subkultur tersebut. Pada suatu masa solidaritas etnik yang seperti ini ternyata telah merugikan seluruh migran Madura di Sambas, Sanggau Ledo, dan Kalimantan Tengah.

Situasi yang digambarkan di atas membuat Orang Dayak masuk kedalam satu keyakinan umum (*appropriate generalized belief*) bahwa keresahan sosial di Kalimantan disebabkan oleh perilaku migran Madura yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka hidup. Bagi mereka semua migran Madura adalah sama, apakah orang kuli, tukang beca, pedagang, pegawai negeri, kyai, atau preman. Mereka semua terikat ke dalam sebuah kelompok eksklusif Madura dan solidaritas Madura. Mereka percaya bahwa Kalimantan akan kembali aman, tenteram, dan damai seperti semula jika seluruh migran ini tidak ada lagi di Kalimantan. Akibatnya, perilaku kriminal dari satu-dua preman harus ditanggung oleh seluruh migran Madura.

Apakah faktor pemicu (*precipitating factors*) dari gerakan massal Orang Dayak melawan migran Madura? Dari hasil kajian terhadap konflik-konflik Dayak-Madura, faktor pemicunya selalu dalam bentuk terbunuhnya seorang atau beberapa Orang Dayak oleh sekelompok migran Madura. Pada masa lalu kejadian-kejadian seperti ini selalu diselesaikan secara damai adat, dengan mengundang tokoh-tokoh adat kedua belah pihak, tanpa menghukum pelaku melalui pengadilan. Namun demikian, karena peristiwa ini kembali terulang lagi, dan terulang lagi, dan polisi, kejaksaan dan pengadilan tidak pernah difungsikan untuk menangani kejadian ini menurut sistem hukum yang berlaku, maka nampaknya pihak Orang Dayak tidak dapat lagi menahan kesabaran mereka. Sehingga akhirnya muncullah pertempuran besar Sanggau Ledo 1997, Sambas 1999, dan Kalimantan Tengah 2001, yang berakibat hilangnya banyak nyawa, khususnya dari kalangan migran Madura, dan terusirnya puluhan ribu migran Madura dari tempat tinggal mereka di berbagai tempat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Bagaimana massa dari kedua belah pihak dimobilisasi oleh pemimpin mereka? Sekali lagi kami katakan, ini adalah hal yang peka dan tersembunyi, karena konsekwensi hukumnya berat bagi para pemimpin tersebut. Dalam peristiwa Sampit Februari 2001, misalnya, pada mulanya Kepolisian setempat mengatakan bahwa mobilisasi massa Dayak dilakukan dua orang provokator, yang kebetulan adalah oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu FA dan Le, yang kecewa karena gerakan otonomi daerah telah menggeser kedudukannya. Pegawai ini telah menyuruh kelompok-kelompok Orang Dayak dengan imbalan uang untuk menyerang dan membakar rumah penduduk Madura. Namun, hal ini kemudian dibantah sendiri oleh pihak Kepolisian, karena mereka tidak punya cukup bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.

Terakhir adalah tentang kontrol sosial. Dalam berbagai kejadian konflik antara penduduk Dayak, atau penduduk Melayu, dengan migran Madura jelas terlihat bagaimana lemahnya kontrol sosial di Kalimantan. Daerah itu bagai tidak punya pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang berwibawa. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan warga berlalu tanpa terkontrol dengan ketat oleh pihak yang berwenang. Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di daerah seolah-olah tidak berdaya, mungkin karena kekurangan dana, atau kurang fasilitas, atau kurang personil, atau kurang moral, atau mungkin kurang semuanya. Kalimantan nampak seperti daerah yang kurang mendapat perhatian Pemerintah Pusat, padahal devisa yang mereka sumbangkan untuk Pemerintah Pusat, khususnya dari Kalimantan Timur, adalah luar biasa besar.

V. Beberapa Analisis Lokal.

Analisis terhadap konflik etnik di Kalimantan sudah banyak dilakukan orang. Sementara itu analisis terhadap konflik ekonomi antara Orang Dayak melawan perusahaan-perusahaan besar belum mendapatkan perhatian yang sepenuhnya.

Sebagian besar dari analisis konflik etnik adalah bersifat sepotong-sepotong, tidak holistik dan tidak mendalam, sehingga pemahaman kita tentang faktor-faktor konflik tidak bersifat komprehensif. Banyak analisis yang bersifat simptomatik, dan konsekwensinya, cara pemecahan konflik yang dianjurkan pun bersifat simptomatik. Bagaimanapun, jika kita rajin membaca berbagai massmedia, kita akan bertemu juga dengan titik-titik cerah untuk melakukan analisa yang lebih mantap.

Salah satu pencerahan diperoleh dari hasil penilaian Komnas HAM (yang turun ke Sampit 27 Februari s/d 1 Maret 2001), yang mengatakan bahwa konflik etnik di Kalimantan,

khususnya antara penduduk asli melawan migran Madura, merupakan akibat dari *akumulasi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan kultural yang tidak ditangani secara adil selama ini*.⁶ Pernyataannya memang hanya sampai di situ. Namun pernyataan ini sekurang-kurangnya menganjurkan orang untuk berpikir secara komprehensif dan historis. Bahwa konflik Dayak-Madura mengandung multi dimensi, dan sebagian dari faktor konflik berada di luar kepentingan migran Madura. Seterusnya, pernyataan itu juga mengingatkan bahwa konflik Dayak-Madura bukanlah satu fenomena semasa, tapi punya akar yang panjang dengan masa lalu, yaitu akumulasi frustrasi Orang Dayak atas berbagai masalah yang menimpa mereka selama ini.

Pencerahan lain berasal dari peristiwa kesepakatan “Tekad Damai Anak Bangsa di Bumi Kalimantan” yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2001, yang ditanda-tangani a.l oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, Jawa Timur.⁷ Kesepakatan ini menelurkan pernyataan bahwa akar dari konflik etnik antara migran Madura dan Orang Dayak di Kalimantan Tengah adalah:

1. *Kebijakan pemerintah yang kurang tepat di masa lalu,*
2. *Proses pembinaan dan pemberdayaan manusia yang kurang berhasil di masa lalu,*
3. *Rasa ketidak-adilan,*
4. *Kemiskinan,*
5. *Keamanan yang tidak kondusif,*
6. *Ketidak-pastian dalam penegakkan hukum, dan*
7. *Benturan budaya,*

Di sini, ternyata kejadian-kejadian masa lalu yang tidak tertangani oleh pemerintah secara memuaskan, sehingga menimbulkan frustrasi di kalangan Orang Dayak, adalah merupakan faktor yang diberi tempat utama. Termasuk ke dalam kejadian masa lalu yang digugat adalah kurangnya perhatian pemerintah dalam usaha peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat Dayak, dan dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan bagi masyarakat Dayak dari ancaman pihak luar. Faktor terakhir adalah ketidak-sesuaian kultural antara masyarakat Dayak dengan migran Madura.

⁶ *Harian Umum Kompas* 7 Maret 2001.

⁷ Termaktub dalam buku *Usul Penyelesaian Jalan Tengah Islah/Rekonsiliasi dari Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah* (Jilid II), diterbitkan oleh Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT, 2001).

Tentang kurangnya perhatian pemerintah dalam memajukan masyarakat Dayak, khususnya di daerah pedalaman, sebagai faktor dalam konflik etnik Dayak-Madura juga ditekankan oleh Drs. AR Mecer, seorang anggota MPR dari Kalimantan. Kongkritnya, dia menuduh bahwa faktor utama dari konflik etnik di Kalimantan adalah kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan isolasi fisik yang dialami masyarakat pedalaman Kalimantan.⁸ Terakhir adalah pernyataan Pemerintah Kalimantan Tengah, yang mengatakan bahwa 3 faktor utama dari konflik etnik di Kalimantan adalah:

1. *Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di daerah tersebut selama 32 tahun terakhir, tidak berbasis kerakyatan dan tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat atau penduduk asli,*
2. *Lemah dan kurang berwibawanya aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum,*
3. *Perilaku sebagian masyarakat Madura yang tidak dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat berdasarkan prinsip "Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung".⁹*

Butir ke tiga dari dugaan di atas, yaitu tentang perilaku sebagian besar migran Madura yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial Kalimantan, nampaknya telah berkembang menjadi semacam stereotip etnik yang populer. Banyak pihak yang berasal dari luar kedua pihak yang terlibat dalam konflik, begitu juga banyak massmedia, beranggapan bahwa salah satu faktor kunci dari konflik etnik di Kalimantan adalah pola perilaku sebagian migran Madura yang agresif, keras, suka melanggar hukum. Ternyata, menariknya, dugaan ini diakui oleh sebagian migran Madura sendiri, dan untuk menyelesaikan masalah mereka bersedia untuk memperbaiki diri.

Pada hari Rabu 28 Maret 2001, misalnya, warga Madura di Pangkalan Bun menyampaikan "Ikhar Pernyataan Warga Madura". Bunyi pernyataan itu adalah sebagai berikut:

1. *Warga Madura Kotawaringin Barat secara ikhlas dan sejujur-jujurnya untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dengan suku bangsa apa pun yang ada di Kotawaringin Barat.*
2. *Warga Madura sanggup beradaptasi menyesuaikan diri serta menghormati kultur masyarakat Kalimantan (Kotawaringin Barat).*

⁸ Harian Umum Kompas 29-3-2001.

⁹ Harian Umum Kompas 16-4-2001.

3. *Warga Madura berjanji untuk tidak melakukan dan atau berbuat sesuatu tindakan yang melawan hukum serta tindakan kriminal lainnya yang merugikan warga masyarakat dan lingkungan.*
4. *Warga Madura tidak menyelesaikan perselisihan dengan cara menggunakan teror, kekerasan, senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Apabila terjadi, akan diselesaikan secara kekeluargaan, atau hukum, dan hukum adat yang berlaku di Kotawaringin Barat.*
5. *Warga Madura tidak melindungi warga yang melanggar hukum, dan tidak menampung pendatang baru yang tidak jelas identitasnya. Sebaliknya harus melaporkan kepada Polri atau TNI segala tindakan kejahatan dan perbuatan dari keluarga atau kerabat, dan warga yang dapat meresahkan dan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat.¹⁰*

Satu pengakuan lagi adalah dari seorang intelektual Madura, dosen STAIN Pontianak, Drs. Abdul Syukur, yang mengusulkan satu perbaikan dalam pola perilaku migran Madura dalam rangka membangun kehidupan sosial yang harmonis antar etnik. Beliau menyebut usulan ini sebagai program kerja. Program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Warga Madura harus jujur menginventarisasi segala kelemahan, kekurangan, dan kekeliruan yang telah dipraktekkan dalam hidup bersama dengan etnis lain di Kalimantan.*
2. *Meminta kesediaan pemuka masyarakat dari semua etnis, baik Dayak, Melayu, Tionghoa, Bugis, Banjar, dan lainnya untuk mengungkapkan, mengoreksi kelemahan dan kesalahan warga Madura.*
3. *Karena pengalaman membuktikan setelah perdamaian digelar yang terlebih dahulu melanggar perjanjian adalah Orang Madura.¹¹*

VI. Faktor-Faktor Dalam Kekerasan Sosial di Kalimantan.

Di atas adalah deskripsi tentang fenomena kerusuhan sosial di Kalimantan menurut kerangka teori Smelser dan beberapa eksplanasi model lokal. Berdasarkan atas uraian tersebut, ditambah dengan sejumlah kajian terhadap literatur konflik etnik dan dokumen-dokumen kejadian konflik etnik dan konflik ekonomi di berbagai tempat di Kalimantan, maka di bawah ini akan disusun kembali faktor-faktor utama dan umum dari kerusuhan sosial di Kalimantan secara lebih sistematis. Faktor-faktor tersebut berlaku baik untuk arena konflik antara penduduk asli dengan perusahaan-perusahaan besar (khususnya HPH dan HTI),

¹⁰ *Harian Umum Kompas 29 Maret 2001.*

¹¹ *Harian Umum Kompas 2-5-2001.*

maupun untuk arena konflik etnik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

1. Agresi-Frustrasi.

Saya pernah menggolongkan konflik antara Orang Dayak melawan Migran Madura di Kalimantan sebagai golongan “non-realistic conflict”.¹² Menurut perkiraan saya pada waktu itu, konflik tersebut, dipandang dari sudut Orang Dayak, adalah semacam pelampiasan rasa frustrasi dan geram yang alang kepalang yang sedang diderita Orang Dayak terhadap Pemerintah Pusat dan perusahaan HPH. Mereka konflik dengan migran Madura bukanlah karena marah kepada migran Madura, bukan karena kesalahan Migran Madura. Migran Madura hanyalah pelampiasan rasa kesal saja. Faktor dari frustrasi tersebut adalah karena selama ini Orang Dayak di pedalaman Kalimantan telah dipojokkan oleh Pemerintah yang kapitalistik, kronistik, tidak adil dan otoriter, khususnya melalui program HPH, HPHTI, Pertambangan dan Perkebunan, ke jurang kesengsaraan yang memalukan dan tidak bertanggung.

Kini saya punya kesadaran lain. Bahwa konflik antara penduduk asli Kalimantan, khususnya Orang Dayak, melawan migran Madura, bukanlah “non-realistic conflict”, tapi “realistic conflict”. Konflik ini benar-benar nyata dengan sebab-sebab yang dikandung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Pihak migran Madura memang menginginkan dan telah membunuh Orang Dayak, sebaliknya begitu juga yang terjadi pada Orang Dayak. Jika kini saya berubah pikiran, maka hal ini mungkin terjadi karena pengetahuan empiris maupun teoritis saya mengenai konflik tersebut makin berkembang. Di samping itu juga perlu dicatat kejadian perubahan situasi politik di Indonesia pada masa akhir-akhir ini, dimana pada masa kini orang lebih bebas mengemukakan pendapatnya tanpa dihantui rasa takut, sehingga analisa sosiokultural dapat dikembangkan menurut fitrahnya.

Namun demikian, teori “agresi-frustrasi” tetap saya pertahankan. Bagi saya, rasa frustrasi Orang Dayak atas pihak-pihak luar, khususnya terhadap migran Madura, terhadap Pemerintah Pusat beserta kebijakan kehutanannya, dan Kepolisian Republik Indonesia, tetap merupakan faktor dasar dari kekerasan sosial di Kalimantan. Faktor frustrasi ini dalam batas-batas tertentu dapat dipadankan dengan faktor *structural strain* dari Smelser.

¹² Lihat Amri Marzali, “Tekanan Penduduk, Kompetisi atas Sumberdaya, dan Kerusuhan Masaal”, dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2, 1997. Jakarta: LIPI.

2. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Liberalisasi dan Komersialisasi Hutan di Kalimantan.

Pertama, Orang Dayak telah dibuat frustrasi oleh kebijakan pengkaplingan hutan Kalimantan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada zaman pemerintahan Soeharto. Pemerintah Pusat, melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan, sejak Pelita I akhir 1960an telah membagi-bagi hampir seluruh hutan alam pedalaman Kalimantan ke dalam areal hutan produksi HPH, tanpa mempedulikan hak dan kedudukan komunitas tradisional Dayak yang ada di atas areal hutan tersebut, tanpa mempedulikan kedudukan dan hak ulayat kelompok-kelompok Dayak atas hutan-hutan tertentu, dan tanpa mempedulikan hak azazi Orang Dayak untuk memenuhi kehidupan mereka dari pertanian berladang, mengumpulkan hasil hutan non-kayu, dan berburu binatang liar di atas tanah hutan. Pada tahun 1996 sekitar setengah dari total perusahaan HPH di seluruh Indonesia, terdapat di Kalimantan.

Ketika Departemen Kehutanan menetapkan sebidang hutan di pedalaman Kalimantan untuk menjadi kawasan HPH milik sebuah perusahaan hutan tertentu dari Jakarta, Pemerintah seolah-olah menganggap bahwa hutan itu adalah hutan alam yang kosong tanda kampung, tanpa penduduk, tanpa kehidupan keagamaan, tanpa kegiatan kebudayaan dan sebagainya. Maka setelah itu, kawasan hutan tersebut menjadi daerah kekuasaan sang HPH, yang didukung oleh bermacam-macam peraturan dari Pemerintah Pusat, khususnya dari Departemen Kehutanan. Sedangkan desa-desa tradisional beserta penduduk yang ada di atas hutan tersebut, kalau ada, ditempatkan di bawah *patronage* sang perusahaan HPH. Dengan kata lain, secara politik ekonomi, kedudukan perusahaan HPH yang baru masuk itu berada di atas desa dan penduduk desa yang sudah beratus-ratus tahun berada dan menggarap hutan tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soeharto memang bukan sebuah pemerintahan yang maju, bijaksana dan teratur. Pemerintah tidak pernah melakukan satu survey atau penelitian yang serius sebelum mengeluarkan kebijakan tentang HPH. Padahal sebagai yang orang bijaksana, Pemerintah mestinya sudah dapat membayangkan dampak sosiokultural dari kebijakan HPH ini terhadap masyarakat tradisional Dayak di pedalaman Kalimantan.

Tabel 2.

JUMLAH PERUSAHAAN HPH MENURUT LOKASI OPERASINYA (Juni 1996)

No.	Lokasi	Jumlah	Persentase
1.	Daerah Istimewa Aceh	16	3.4
2.	Sumatera Utara	14	3.0
3.	Sumatera Barat	8	1.7
4.	Riau	51	10.9
5.	Jambi	22	4.7
6.	Sumatera Selatan	16	3.4
7.	Bengkulu	4	0.9
8.	Kalimantan Barat	46	9.8
9.	Kalimantan Tengah	91	19.5
10.	Kalimantan Selatan	11	2.4
11.	Kalimantan Timur	77	16.5
12.	Sulawesi Selatan	8	1.7
13.	Sulawesi Tengah	15	3.2
14.	Sulawesi Utara	8	1.7
15.	Sulawesi Tenggara	3	0.6
16.	Nusa Tenggara Barat	2	0.4
17.	Maluku	31	6.6
18.	Irian Jaya	44	9.4
Jumlah		467	100.0

Sumber: APHI Jakarta.

Pada masa kini, menurut Ir.Nana Suparna dari Alas Kusuma Group, dalam sebuah ceramah di CSIS bulan Juli 2001, di seluruh Indonesia tinggal sekitar 300an HPH. Selebihnya sudah tutup atau ditutup oleh Pemerintah.

Pemerintah Republik Indonesia di bawah Soeharto bahkan jauh kurang bijaksana dibandingkan dengan Pemerintah Kolonial Belanda satu abad lebih yang lalu. Kiranya ahli-ahli sejarah ekonomi Indonesia tentu masih ingat kepada apa yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda sebelum mereka menghapuskan sistem ekonomi Tanam Paksa dan melancarkan politik liberalisasi ekonomi di negeri jajahan Netherlands Indie pada tahun 1870. Dua tahun sebelum kebijakan liberalisasi ekonomi dilancarkan, dan *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit* dikeluarkan, yaitu pada tahun 1868-1869, Pemerintah kolonial telah melakukan satu survai besar, khususnya di Jawa dan Madura, yang menghasilkan 3 jilid laporan *Eindresume van het Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op de Grond* (1876, 1880, 1896).¹³

Dengan hasil survai ini, Pemerintah Kolonial menjadi tahu tentang sistem pemilikan tanah dan sistem pemerintahan desa di Jawa dan Madura. Kemudian dengan berbekal pengetahuan ini, Pemerintah dengan mudah mengatur pengalokasian tanah di Jawa dan

¹³ Hiroyoshi Kano, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa Pada Abad XIX", dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Madura untuk keperluan perusahaan perkebunan swasta, untuk keperluan kehutanan negara dan untuk keperluan pertanian dan peternakan penduduk lokal. Tinggi di puncak-puncak gunung adalah areal tanah yang dialokasikan untuk hutan negara dan perkebunan besar swasta. Di bawahnya adalah areal tanah yang dialokasikan untuk hutan desa, tegalan dan pesawahan milik penduduk desa. Dan di antara kedua areal tanah tersebut terbentang sebuah *buffer zone* yang disebut Tanah G.G. Sehingga tidak terjadi singgung-menyinggung dan konflik antara kepentingan negara dengan kepentingan penduduk desa dalam hal tata guna tanah.

Dalam melakukan alokasi areal ini, Pemerintah Kolonial berlaku cukup adil. Apabila sebuah kawasan ditetapkan menjadi daerah hutan negara. Pemerintah akan meneliti apakah di atas kawasan tersebut benar-benar tidak ada lahan pertanian, atau kegiatan produktif lain, dari penduduk desa. Jika ada, maka lahan pertanian *enclave* tersebut akan diminta pindahkan, atau diganti rugi oleh Pemerintah.¹⁴ Semua hal yang diceritakan di atas tidak pernah terjadi di hutan-hutan HPH pada zaman pemerintahan Soeharto, termasuk hutan HPH di Kalimantan.

3. Alat Negara Yang Tidak Berwibawa dan Berdaya.

Sejak Kepolisian Negara di masukkan di bawah ABRI yang militer, di Indonesia tidak ada lagi pembagian tugas yang jelas dalam bidang keamanan dan pertahanan. Kedua tugas tersebut ditangani oleh militer, dan di bawahnya berada Kepolisian. Kepolisian tidak mandiri dan tidak berwibawa dalam menjaga keamanan masyarakat. Sewaktu-waktu militer dapat mengintervensi Kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan. Akibatnya, Kepolisian berfungsi rancu dan tidak optimal.

Kerancuan dalam pembagian tugas ini, pada zaman Pemerintahan Soeharto, diperberat lagi oleh gaji Kepolisian yang kecil sehingga anggota Polisi cenderung berperilaku korup. Kecilnya anggaran untuk Kepolisian membuat Kepolisian selalu berada dalam kondisi kekurangan fasilitas dan kekurangan personil. Sementara itu anggota Kepolisian dididik secara militer dengan nilai kultural dan sikap mental militer, yang membuat perilaku anggota Polisi cenderung keras dan opresif. Padahal Kepolisian adalah instansi yang paling depan dalam menegakkan kontrol sosial dalam masyarakat. Akibat dari semua ini adalah invalidnya hukum. Masyarakat tidak terlindungi dari kriminal. Kehidupan sosial tidak aman dan tenteram.

¹⁴ Amri Marzali, *The Urang Sisi of West Java; A Study of Peasants' Responses to Population Pressure*. Disertasi Ph.D., Boston University, 1992.

Apabila terjadi konflik antar etnik, maka konflik ini cenderung diselesaikan dengan cara yang tidak mengeluarkan biaya banyak, tidak memerlukan penegakkan hukum formal, dan kalau bisa bahkan Polisi dapat mengambil sedikit keuntungan dari peristiwa konflik tersebut. Misalnya, dalam hal pencurian, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang preman Madura, kalau tertangkap, pencuri dijamin tidak akan diteruskan ke kejaksaan dan pengadilan, tapi diselesaikan secara “damai” oleh Kepolisian. Pencuri dan pembunuh Madura tersebut dapat “ditebus” oleh teman atau kerabatnya dengan cara membayar sejumlah uang kepada Polisi yang menangkap. Hal ini membuat Orang Dayak merasa frustrasi terhadap Kepolisian.¹⁵

Contoh terakhir dari keadaan ini adalah peristiwa *riot* Sampit yang dipicu oleh kejadian terbunuhnya seorang Dayak oleh 3 orang preman Madura di Karengpangi bulan Desember 2000. Menurut A.Z Maulani (dalam berita SCTV, Kamis 8-03-2001), setelah peristiwa Karengpangi itu, semua pihak termasuk ulama Madura sudah menghimbau pemerintah, khususnya Kepolisian, untuk menyelesaikan perkara ini secara hukum, menangkap dan menghukum sang pembunuh. Tapi sampai pecahnya peristiwa *riot* Sampit Februari 2001 tidak ada penyelesaiannya. Pembunuhnya entah kemana. Dan konflik etnik di Sampit Februari 2001 adalah konflik besar yang ke 17 di Kalimantan yang melibatkan migran Madura melawan Orang Dayak.

Satu hal lagi, karena Kepolisian tidak mau repot-repot, konflik etnik cenderung diselesaikan secara simptomatik dengan mode damai adat. Dalam damai adat ini yang berperan terutama adalah para pemimpin kelompok. Sementara itu pihak yang terlibat secara langsung dalam konflik, khususnya mereka yang menjadi korban dan dirugikan, tidak terpuaskan. Kepolisian hanya mau cari gampang saja, melepas tanggung jawab, berpola tindakan burung onta, sampah dan berbagai masalah sosial disapu ke bawah karpet.

Hal inilah yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1997 dan 1999, dan *riot* Sampit Februari 2001 yang merembet sampai ke Palangka Raya, Kuala Kapuas, dan Pangkalan Buun. Polisi, sebagai institusi kontrol sosial yang paling depan, tidak berdaya menegakkan

¹⁵ Tentang mewabahnya kriminalitas preman Madura yang membuat frustrasi penduduk berbagai suku-bangsa di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dapat dibaca dalam buku *Usulan Penyelesaian Jalan Tengah Islah/Rekonsiliasi dari Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah* (Jilid II), diterbitkan oleh Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT), 2001, dan Muhil Shonhadji, *Interaksi Sosial Antar Warga Beragam Suku Bangsa di Desa Durian, Kabupaten Pontianak*, Tesis Magister pada Program Studi Pascasarjana Antropologi, FISIP Universitas Indonesia, 2001.

hukum, baik terhadap preman Madura yang mencelurit penduduk Dayak, maupun terhadap *riot* Dayak terhadap migran Madura.

4. Sistem Pemerintahan yang Sentralistik.

Kalimantan adalah “daerah” bukan “Pusat”. Bahkan lebih jauh dari itu, Kalimantan dalam mata orang pusat sering dianggap sebagai daerah dan masyarakat yang tertinggal. Dalam sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik pada zaman Soeharto, daerah tidak dapat berbuat banyak terhadap pusat, khususnya daerah Kalimantan. Kecuali di Kalimantan Selatan, di propinsi Kalimantan yang lain hanya pada awalnya saja jabatan Gubernur dipangku oleh putra daerah, seperti Gubernur Tjilik Riwut dan Silvanus dari Kalimantan Tengah dan Uveng Oerai dari Kalimantan Barat. Setelah itu, jabatan Gubernur selalu dicarikan orang dari pulau Jawa, apakah Orang Jawa atau Orang Sunda. Lama kelamaan, bukan hanya jabatan Gubernur yang dikuasai oleh orang dari pulau Jawa, tapi juga Jabatan Bupati. Keadaan ini jelas membuat frustrasi putra-putra daerah yang merasa berkemampuan untuk memimpin daerahnya.

Ketidak berdayaan daerah, karena kuatnya pemerintah pusat, juga berlaku dalam aspek kebijakan pembangunan. Semua kebijakan besar dan penting ditentukan dari pusat, termasuk kebijakan pemberian izin memanfaatkan hasil hutan, membuka perusahaan pertambangan, perkebunan, dan hutan tanaman. Hampir seluruh pajak dan iuran perusahaan ini dikutip oleh pusat. Devisa yang dihasilkan daerah dihisap oleh pusat. Seolah-olah hal itu adalah perbutan yang wajar. Sementara itu, dana pembangunan untuk daerah di kucurkan dari pusat sebagai sebagai sebuah berkah, sebagaimana raja Jawa pada masa lampau memberikan “berkah” kepada rakyat dan abdi dalemnya. Seolah-olah dana yang dikucurkan itu berasal dari pencarian pusat sendiri, bukan dana hasil hisapan pusat atas daerah. Daerah tidak berdaya melawan akan “penjajahan” pusat ini. Daerah menjadi frustrasi.

Rasa frustrasi politik ini lebih dirasakan oleh penduduk asli Kalimantan non-Islam. Dominasi politik non-Islam hanya berlaku pada periode awal berdirinya Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu jabatan Gubernur, dan sebagian besar jabatan Bupati dipegang oleh pejabat yang beragama Islam, apakah dia putra daerah ataupun bukan. Seorang intelektual Dayak non-Islam, J.J. Kusni, baru-baru ini mengeluh sebagai berikut:

“Dominasi suku-suku dan agama besar yang merupakan wabah peninggalan Orba masih nampak dari proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur akhir-akhir ini. Uang masih menjadi raja, dan raja inilah yang menabur wabah ke mentalitas penduduk serta elite

kekuasaan lokal. Dalam istilah Orang Dayak Kalteng: "Mereka menjual tulang belulang nenek-moyang mereka sendiri".¹⁶

5. Negara dan Masyarakat Indonesia Dalam Keadaan Darurat.

Mengapa maraknya kekerasan sosial di Kalimantan, dan di Indonesia pada umumnya, baru terjadi pada tahun-tahun terakhir ini, khususnya menjelang dan segera sesudah kejatuhan Soeharto? Jawabnya dapat kita acukan kepada kondisi umum (socio-politiko-ekonomi) Indonesia pada masa tersebut.

Kondisi pertama adalah situasi politik di Indonesia, di mana kedudukan pemerintah berada dalam keadaan kurang stabil dan lemah. Keadaan ini bahkan masih berlaku sampai saat ini (Juli 2001). Akibatnya pemerintah kurang punya kemampuan untuk menjaga hak-hak legal masyarakat. Bahkan membela orang Madura dalam kejadian-kejadian *riot* Kalimantan Barat pada tahun 1997 dan 1999, dan Kalimantan Tengah 2001 dapat dianggap sebagai tindakan memusuhi penduduk asli Orang Melayu dan Orang Dayak. Karena itulah kita melihat bagaimana petugas keamanan seolah-olah membiarkan saja penduduk asli membunuh Orang Madura dan membakar rumah dan harta Orang Madura, tanpa ditindak menurut hukum yang berlaku. Seolah-olah ada semacam hukum khusus yang berlaku dalam masa kerusuhan tersebut. Argumen yang serupa juga berlaku untuk kasus-kasus serbuan penduduk lokal terhadap perusahaan HPH, HTI dan pertambangan

Kedua, semua kita tahu bahwa rangkaian peristiwa di atas terjadi pada masa resesi ekonomi di Indonesia, di mana rakyat kebanyakan hidup dalam keadaan ekonomi *kepepet* (terdesak). Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang membuahkan pengangguran. Banyak penduduk miskin yang tidak lagi mampu makan secara normal.¹⁷ Dalam situasi krisis seperti ini, Orang Madura dan perusahaan HPH telah dituding oleh penduduk asli Kalimantan sebagai penyebab utama kemelaratan mereka.

6. Euforia Gerakan Otonomi Daerah dan Demokrasi.

Pengamatan seorang ahli politik dari Columbia University (USA), Jack Snyder, menghasilkan satu generalisasi bahwa hampir semua konflik etnik yang keras selama

¹⁶ J.J. Kusni, *Negara Etnik: Beberapa Gagasan Pemberdayaan Suku Dayak*. Yogyakarta: FuSPAD, 2001.

¹⁷ Analisis ini terinspirasi oleh tulisan Jamie A.C. Mackie yang berjudul "Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia, 1959-68", yang termaktub dalam buku *The Chinese in Indonesia: Five Essays* (Kuala Lumpur; Heineman Educational Book Ltd. 1976: 135-137).

dasawarsa 1990an terjadi di negara-negara yang baru saja menikmati udara segar kebebasan politik, kebebasan pers, dan perlindungan HAM.¹⁸

Indonesia adalah sebuah negara besar penduduk yang baru saja melompat secara keras dan menyentak keluar dari dunia otoritarian masuk ke dunia demokrasi pada tahun 1998. Hampir seluruh institusi sosial dalam masyarakat menjadi goncang. Pihak-pihak yang selama ini merasa tertekan dan dirugikan oleh penguasa lama menuntut dikembalikan hak-hak azazi mereka. Di mana-mana muncul suasana euforia menuntut sistem politik dan sistem ekonomi yang demokratis, yang utama di antaranya adalah tuntutan akan otonomi daerah dan pembagian pendapatan yang adil antara Pusat dan Daerah.

Seiring dengan tuntutan tersebut muncul makin populer di kalangan tertentu konsep lama yang selama ini ditekan oleh Pemerintah Soeharto, yaitu “putra daerah” dan “masyarakat adat”. Mereka yang mengaku sebagai anggota dari kedua golongan ini menggugat kaum *establishment*, baik di Pusat maupun di Daerah, baik di sektor pemerintahan maupun disektor swasta, yang selama ini dianggap telah merugikan dan melecehkan hak azazi mereka. Pada level nasional, kedua konsep di atas adalah cerminan tuntutan Daerah kepada Pusat, sementara itu pada ruang lingkup daerah, itu adalah cerminan tuntutan penduduk asli suatu daerah tertentu terhadap kelompok migran yang selama ini mendominasi daerah mereka secara politik dan ekonomi.

Pada masa lampau, gugatan yang seperti ini dapat disebut sebagai gerakan *nasionalisme daerah*, atau gerakan *separatisme*, yaitu satu jenis gerakan sosial yang dipadang dengan mata negatif dan dituduh dilakukan dengan cara memanipulasi dan mempolitikan *Sargoda*.¹⁹ Tapi, ahli politik Snyder punya pendapat lain. Bagi beliau, gerakan tersebut adalah semacam gerakan *nasionalisme* dengan menggunakan definisi baru, bahwa bangsa tidak perlu bertautan (*congruent*) dengan negara. Nasionalisme adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa rakyat – yang percaya bahwa mereka punya ciri-ciri khas dalam budaya, sejarah, lembaga sosial – patut punya hak untuk mengatur diri sendiri dalam satu unit politik yang berfungsi mencerminkan dan melindungi ciri-ciri khas tersebut.²⁰

Prinsip yang menjadi dasar gerakan mereka adalah demokratisasi dan keadilan. Kiranya, adalah tidak salah kalau kita mengaitkan fenomena kerusuhan sosial di Kalimantan

¹⁸ Dikutip dari Parakitri, “Demokrasi Menimbulkan Disintegrasi”, dalam Harian Umum *Kompas*, 2 Maret 2001.

¹⁹ SARGODA adalah singkatan dari Suku-bangsa, Agama, Ras, Golongan, dan Daerah. Ini adalah satu singkatan yang menurut penulis lebih tepat untuk menggantikan singkatan SARA, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia maupun fenomena sosial-politik yang dicakupnya.

yang mempertontonkan gugatan penduduk asli Kalimantan, yaitu Orang Melayu dan Orang Dayak, terhadap pendatang luar yang selama ini mereka anggap telah menghisap kekayaan alam mereka dan melecehkan derajat sosiokultural mereka, dengan gerakan *nasionalisme* baru ini. Kerusuhan sosial di Kalimantan adalah semacam ekspresi *nasionalisme* Orang Melayu di Kalimantan Barat, dan Orang Dayak di Kalimantan Tengah, di dalam masa suasana euforia demokrasi. Namun demikian, gerakan ini belum sampai menyentuh tuntutan politik yang lebih jauh terhadap pemerintah Pusat. Dengan kata lain, kerusuhan sosial sebagai ekspresi tuntutan penduduk asli daerah Kalimantan baru ditunjukkan dalam bentuk *riot*, belum meningkat menjadi *social movement*.

7. Konflik Etnik.

Fenomena konflik etnik di Kalimantan adalah menarik dan unik, karena yang menjadi sasaran kemarahan penduduk asli nampaknya hanyalah terbatas pada suku-bangsa Madura. Lagi pula, dalam kerusuhan sosial yang dilancarkan oleh pihak penduduk asli terhadap Orang Madura, migran dari suku-bangsa lain (Jawa, Banjar, Bugis, dll) nampak seolah-olah lebih manaruh simpati kepada penduduk lokal alih-alih kepada migran Madura. Padahal korban yang ditimbulkan oleh kerusuhan ini betul-betul mengundang keprihatian semua pihak yang berhati nurani kemanusiaan. Sebagian besar korban adalah mereka yang tidak bersalah secara langsung, khususnya wanita dan anak-anak. Sementara itu sebagian besar preman Madura yang selama itu merajalela dengan perilaku kriminalitasnya sempat menyelamatkan diri.

Namun demikian, dari peristiwa konflik etnik ini tercium juga pola perilaku migran Madura yang tidak *compatible* dengan lingkungan sosial di daerah konflik. Penelitian Shonhadji, seperti yang dikutip di atas, memperlihatkan bagaimana tidak nyaman dan amannya tinggal sedesa bersama migran Madura. Dalam desa yang multi etnik tersebut, sasaran pencurian adalah selalu penduduk non-Madura. Semua orang desa sudah tahu siapa para pencuri tersebut. Namun mereka tidak mampu menangkap pencuri tersebut, karena akan berhadapan dengan seluruh migran Madura dalam desa tersebut. Penduduk Madura itu tidak segan menggunakan kekerasan bersenjata. Solidaritas Madura tidak membedakan anggota yang kriminal dari anggota yang kyai. Hal ini telah dibuktikan dalam semua peristiwa konflik etnik. Mengadukan pencuri tersebut adalah pekerjaan yang sia-sia, bahkan mungkin membunuh diri sendiri.

²⁰ Kami menghindar dari pembicaraan tentang konsep ini dalam makalah yang terbatas ini. Untuk

Orang Madura terkenal fanatik dalam beragama Islam. Namun mereka hanya sembahyang dalam masjid sendiri, mengaji dengan kyai sendiri, kenduri dengan cara sendiri, dst. Orang Madura tinggal bersama, atau berdekatan dengan Orang Madura juga. Meskipun terjadi perkawinan campuran, tapi bentuk perkawinan yang umum adalah diantara sesama Orang Madura. Eksklusifitas ini membuat Orang Madura tidak pernah dapat berbicara dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang netral. Intonasi dan irama bahasa Madura melekat erat dalam ekspresi verbal mereka.

Keunikan pola perilaku migran Madura ini diakui oleh sebagian migran Madura yang kritis. Sebagian orang mengacukan keunikan ini dengan kelas sosial, bahwa sebagian besar migran Madura di Kalimantan berasal dari kelas sosial bawah, kurang terdidik dalam pendidikan umum. Sebagian lain menghubungkan dengan daerah asal dari sebagian besar migran tersebut, yaitu Sampang, yang terkenal gersang dan keras.

Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan dugaan-dugaan sekitar perilaku migran Madura yang tidak *compatible* ini. Satu pertanyaan yang menarik untuk diajukan dari sudut kajian komparatif adalah “mengapa kejadian konflik etnik ini tidak terjadi di Jawa Timur, di mana jumlah migran Madura juga cukup banyak” ? Apakah karena, dalam pandangan migran Madura, Orang Jawa lebih tinggi peradabannya dibanding Orang Melayu dan Orang Dayak di Kalimantan? Karena itu mereka lebih menghargai dan segan kepada Orang Jawa dibanding kepada Orang Melayu dan Orang Dayak. Atau adakah faktor-faktor lain. Cukup banyak bidang penelitian antropologi yang dapat dirancang tentang *modal personality* Orang Madura ini.

8. Pertumbuhan Penduduk.

Faktor terakhir yang ingin saya ajukan dalam makalah ini adalah masalah pertumbuhan jumlah penduduk Dayak pedalaman yang hidup tergantung dari sistem pertanian berladang rotasi. Dalam keadaan normal sistem teknologi perekonomian yang seperti ini hanya dapat berlangsung dalam kepadatan penduduk paling banyak 10 orang per mil persegi, dan sebuah desa yang berpenduduk tidak melebihi 250 orang.²¹

Pertumbuhan jumlah penduduk secara terus menerus jelas terjadi pada masyarakat peladang Dayak ini, khususnya akibat dari perbaikan gizi dan kesehatan umum. Konsekwensi dari pertumbuhan penduduk ini adalah diperlukannya pembukaan ladang-ladang baru dari

pembicaraan yang lebih serius perlu satu persiapan yang lebih panjang.

hutan perawan. Dalam keadaan normal, jika hutan untuk membuka ladang baru ini sudah terbatas, maka masa bera (*fallow*) sebuah ladang terpaksa dipersingkat. Pada suatu masa dulu, sebuah ladang akan ditinggal bera selama 7 sampai 10 tahun. Pada masa kini katanya masa bera sebuah ladang tinggal 3 sampai 4 tahun saja. Konsekwensi dari singkatnya masa bera ini adalah turunnya kesuburan ladang, dus berarti menurunnya produktifitas ladang.

Itu adalah cerita dalam keadaan normal. Sedangkan kita tahu bahwa kondisi hutan pedalaman sebagai sumber kehidupan penduduk Dayak peladang rotasi sudah mengalami perubahan besar sejak pembangunan hutan Orde Baru. Dengan dibukanya HPH, HTI, Perkebunan besar, dan pertambangan besar maka kawasan hutan belantara kalimantan yang masih tersedia bagi masyarakat peladang rotasi menjadi makin sangat terbatas. Sementara itu pemerintah tidak membuka dan memperkenalkan peluang mata pencarian hidup alternatif bagi peladang tersebut.

Memang secara tidak langsung pemerintah mengharuskan perusahaan HPH untuk memperkenalkan sistem pertanian sawah kepada penduduk. Namun yang menjadi masalah adalah seberapa mampu perusahaan tersebut melakukan usaha itu. Berapa banyak biaya dan tenaga ahli yang mereka punyai untuk memperkenalkan dan mengembangkan sistem pertanian sawah tersebut.²² Hal ini belum lagi memperhitungkan hambatan yang datang dari kondisi tanah hutan Kalimantan yang penuh dengan tanah gambut dan dengan keasaman tinggi. Pokoknya secara empiris dapat dikatakan bahwa usaha pemerintah untuk membuka peluang usaha bagi penduduk pedalaman Kalimantan di luar berladang rotasi adalah kosong. Jadi penduduk tersebut dibiarkan menyelesaikan masalah perut mereka menurut cara mereka sendiri.

Ini jelas tidak adil. Sementara itu mereka tidak punya tempat mengadu dan tempat minta pertolongan. Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah, tahunya hanya memungut pajak dari hasil eksploitasi hutan yang dilakukan oleh kapitalis-kapitalis besar. Inilah sumber utama frustrasi penduduk asli pedalaman Kalimantan. Inilah yang mereka lampiaskan kepada base-camp perusahaan tersebut dan kepada migran Madura.

Penutup.

²¹ Marshall D. Sahlins, *Tribesmen*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1968:31.

²² Silahkan lihat tulisan Amri Marzali, "Dampak Kegiatan HPH Terhadap Masyarakat Desa Sekitarnya", makalah dibacakan dalam *Seminar Sehari Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan: Pengalaman di Lapangan Bersama Perusahaan Pemegang HPH*, yang diselenggarakan oleh Laboratorium Antropologi FISIP-UI, tanggal 12 Juni 1997, di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

Tulisan ini lebih bersifat analisis awal atau sementara. Penulis menyadari bahwa masih banyak daerah-daerah permasalahan yang memerlukan penelitian lanjutan secara lebih serius dan sistematis. Demikian juga, banyak data dan informasi belum terungkap sepenuhnya karena terbatasnya tempat, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan HPH, HTI, dan Pertambangan. Karena itu pertanyaan pokok dalam penelitian ini belum terjawab secara sempurna dan memuaskan.

